

Perlindungan Hukum terhadap pemenang lelang pada pelelangan barang tidak bergerak melalui Kantor Lelang Negara (KLN) di Jakarta (Studi kasus perkara perdata putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia peninjauan kembali (PK) No. 466 PK/Pdt/2002))

Lumoidong, Aurelia.E., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20282690&lokasi=lokal>

Abstrak

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam praktek penjualan lelang ini masih adanya kelemahan di mana pembeli lelang yang beritikad baik dan telah mendapatkan bukti Kutipan Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara tidak dapat menguasai objek lelang yang menjadi haknya. Pembeli tersebut bahkan digugat oleh pihak ketiga di pengadilan dan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini menelaah permasalahan bagaimana perlindungan hukum pemenang lelang barang tidak bergerak pada lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam hal terjadi pembatalan Risalah Lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif dan preskriptif.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pembeli lelang yang beritikad baik belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal di mana pembeli lelang yang telah melaksanakan kewajibannya secara baik namun tetap tidak mendapatkan haknya untuk dapat menguasai objek lelang dan memberikan saran agar calon pembeli lelang harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari sebelum pelaksanaan lelang dilakukan selain itu perlu dilakukan penyempurnaan peraturan lelang khususnya perlunya diperhatikan pasal mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk mendapat jaminan kepastian hukum.

.....Auctions are the sale of goods that are open to the public through the sealed bid and / or the open ascending or descending bid to achieve the highest price that is preceded by the announcement of the auction. Theoretically, the winning bidder acting in good faith at an auction conducted by the State Auction Office must be protected by law. However, this case study found that a buyer of an auction was sued by a third party in court and the Auction Deed issued by the State Auction Office was canceled by the court. Therefore, this study examines the legal protection of a winning bidder of the immovable goods auctioned by the State Auction Office in relation to the execution of bad debt managed by the State Receivables Committee and what remedies can be taken by the winning bidder in the event of cancellation of the Auction Deed. This research is a normative juridical study with descriptive and prescriptive research. From this study, the author concludes that a good faith purchaser at an auction does not receive maximum legal protection although the purchaser has fulfill all his duties. The study shows that the purchaser finally does not get the goods bought from the auction. The author, therefore, advices the prospective buyers of an auction to take some preventive actions before buying goods at the auction in order to avoid problems in the future and advices the Government of Indonesia to improve auction rules specifically to provide more legal protection for the winning bidders (purchasers) of auctions.